

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Semarang. UMKM dipilih sebagai fokus karena sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal maupun nasional, sekaligus menghadapi tantangan signifikan terkait pemahaman perpajakan, administrasi, dan kepatuhan pajak. Studi ini berupaya menganalisis determinasi kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM di Kota Semarang sebagai dasar untuk memahami kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Data dari sistem I-JUS MELON (Izin Usaha Melalui Online) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016. Pada 2016 tercatat 5.902 pelaku usaha, kemudian meningkat menjadi 17.913 UMKM pada 2020 atau tumbuh sebesar 203,51%, dan hingga 2023 jumlahnya mencapai 30.024 UMKM. Pertumbuhan jumlah UMKM ini juga diikuti oleh peningkatan tenaga kerja, dari 10.573 orang pada 2016 menjadi 20.297 orang pada 2020, meningkat 191,97% sehingga secara keseluruhan menandakan bahwa ekspansi sektor UMKM di Semarang tidak hanya berdampak pada volume usaha tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja secara signifikan (Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang, 2025).

4.1.1 Karakteristik Responden Penelitian

4.1.1.1 Responden Menurut Umur

Karakteristik responden pada penelitian ini dikelompokkan dalam tiga Variabel umur dalam penelitian ini diukur berdasarkan usia wajib pajak pada saat penyebaran kuesioner dilakukan kepada 100 pelaku UMKM di Kota Semarang. Identifikasi karakteristik umur responden ini penting untuk memahami profil demografis wajib pajak yang menjadi objek penelitian, khususnya karena usia sering diasosiasikan dengan pengalaman usaha, tingkat kedewasaan dalam pengambilan keputusan, serta potensi perbedaan perilaku kepatuhan pajak. Melalui pengumpulan data tersebut, penelitian dapat memetakan distribusi usia responden dan menganalisis apakah variasi umur memiliki implikasi terhadap perilaku perpajakan UMKM, sehingga memberikan dasar yang lebih kuat dalam menarik kesimpulan mengenai hubungan antara faktor demografis dan tingkat kepatuhan pajak.

Tabel 4. 1 Responden Menurut Umur Pelaku UMKM

Umur	Jumlah	Persentase
21 hingga 30 tahun	6	6,0%
31 hingga 40 tahun	37	37,0%
41 hingga 50 tahun	45	45,0%
Lebih dari 50 tahun	12	12,0%
Total	100	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Semarang berada pada kelompok usia produktif yaitu 41 hingga 50 tahun sebesar 45%, diikuti kelompok usia 31 hingga 40 tahun sebesar 37%. Sementara itu, responden berusia 21 hingga 30 tahun hanya berjumlah 6%, dan responden

berusia lebih dari 50 tahun sebesar 12%. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian didominasi oleh kelompok usia matang yang secara umum telah memiliki pengalaman usaha lebih panjang dibandingkan kelompok usia lebih muda. Dominasi usia produktif ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas UMKM di Kota Semarang banyak dijalankan oleh individu yang berada pada tahap stabil dalam karier maupun usaha, sehingga aspek kedewasaan dalam pengambilan keputusan bisnis dan administrasi, termasuk urusan perpajakan, dapat dianggap relatif lebih mapan.

4.1.1.2 Responden Menurut Gender

Variabel gender pada penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil identifikasi terhadap 100 responden pelaku UMKM di Kota Semarang menunjukkan komposisi yang mencerminkan keterlibatan kedua gender dalam aktivitas usaha. Pembagian responden berdasarkan gender ini penting untuk dianalisis karena sejumlah penelitian sebelumnya mengaitkan perbedaan gender dengan pola perilaku ekonomi, termasuk kecenderungan dalam kepatuhan administrasi perpajakan.

Tabel 4. 2 Responden Menurut Gender Pelaku UMKM

Gender	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	50	50,0%
Perempuan	50	50,0%
Total	100	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa komposisi responden pelaku UMKM di Kota Semarang antara laki-laki dan perempuan berada dalam proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 50%. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa partisipasi gender dalam aktivitas UMKM relatif merata, sehingga analisis mengenai kepatuhan pajak tidak didominasi oleh salah satu kelompok gender. Kondisi ini juga memberikan gambaran bahwa sektor UMKM di Kota Semarang melibatkan kontribusi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga variabel gender dapat dianalisis secara objektif tanpa bias distribusi sampel. Selain itu, keseimbangan tersebut memperkuat validitas temuan penelitian ketika menilai apakah jenis kelamin memiliki peran dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM.

4.1.1.3 Responden Menurut Pendidikan

Variabel pendidikan dalam penelitian ini menggambarkan jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh oleh para wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat pendidikan responden dapat berkaitan dengan kemampuan mereka dalam memahami informasi, termasuk aturan dan kewajiban perpajakan. Identifikasi pendidikan formal juga memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia di sektor UMKM, khususnya terkait literasi administrasi, kemampuan mengelola usaha, serta potensi pemahaman terhadap sistem perpajakan. Dengan mengetahui distribusi tingkat pendidikan responden, analisis selanjutnya dapat menilai apakah perbedaan jenjang pendidikan memiliki kecenderungan memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pada konteks UMKM di Kota Semarang..

Tabel 4. 3 Responden Menurut Pendidikan Pelaku UMKM

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sekolah Dasar	1	1,0%
SMP/ Sederajat	10	10,0%
SMA/Sederajat	37	37,0%
Diploma	33	33,0%
Perguruan Tinggi	19	19,0
Total	100	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Semarang memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Responden dengan pendidikan SMA/ sederajat merupakan kelompok terbesar yaitu 37% dari total responden, diikuti oleh lulusan diploma sebanyak 33%, dan perguruan tinggi sebesar 19%. Sementara itu, responden dengan pendidikan SMP/ sederajat berjumlah 10%, dan hanya 1% yang berpendidikan sekolah dasar. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan yang relatif memadai sehingga diasumsikan memiliki kemampuan dasar dalam memahami informasi administrasi usaha maupun perpajakan.

4.1.1.4 Responden Menurut Pendapatan

Variabel pendapatan pada penelitian ini menggambarkan besarnya penghasilan yang diterima wajib pajak UMKM setiap bulan dari usaha UMKMinya. Pendapatan digunakan untuk melihat kapasitas ekonomi pelaku usaha serta kemungkinan keterkaitannya dengan keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui pengelompokan pendapatan, penelitian ini dapat

menilai keragaman kondisi finansial responden dan memahami bagaimana distribusi penghasilan tersebar di antara pelaku UMKM di Kota Semarang.

Tabel 4. 4 Responden Menurut Pendapatan Pelaku UMKM

Umur	Jumlah	Persentase
Kurang dari 200 juta/bulan (kurang dari 2,5 miliar per tahun)	6	6,0%
200 – 300juta/bulan	24	24,0%
300 – 400juta/bulan	44	44,0%
400 – 500juta/bulan	25	25,0%
Lebih dari 500juta/bulan	1	1,0%
Total	100	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Semarang berada pada kelompok pendapatan 300–400 juta per bulan dengan persentase 44%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori usaha dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Kelompok pendapatan 200–300 juta per bulan juga cukup besar, yaitu 24%, disusul oleh kelompok 400–500 juta per bulan sebesar 25%, yang menunjukkan bahwa sekitar seperempat pelaku UMKM telah memiliki kapasitas finansial yang relatif kuat. Sementara itu, responden dengan pendapatan sangat rendah (kurang dari 200 juta per bulan) dan sangat tinggi (lebih dari 500 juta per bulan) masing-masing hanya 6% dan 1%, yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan UMKM cenderung terkonsentrasi pada kelas menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam penelitian ini didominasi oleh usaha yang telah berkembang secara finansial.

4.1.1.5 Responden Menurut Lama Menjalankan Usaha UMKM

Identifikasi responden berdasarkan lama menjalankan usaha UMKM dapat diketahui melalui penyebaran angket kepada 100 pelaku UMKM seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Responden Menurut Lama Menjalankan Usaha UMKM

Lama Usaha UMKM	Jumlah	Persentase
5 hingga 7 Tahun	16	16,0%
8 hingga 10 tahun	26	26,0%
11 hingga 13 tahun	44	44,0%
14 hingga 16 tahun	13	13,0%
Lebih dari 16 tahun	1	1,0%
Total	100	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.5, mayoritas responden UMKM di Kota Semarang telah menjalankan usaha mereka selama 11 hingga 13 tahun, yaitu sebanyak 44 responden atau 44%, diikuti oleh 26% yang telah beroperasi selama 8 hingga 10 tahun, dan 16% selama 5 hingga 7 tahun. Hanya 13% pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya selama 14 hingga 16 tahun, serta 1% yang beroperasi lebih dari 16 tahun. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yang menjadi responden merupakan usaha yang telah cukup mapan, berpengalaman, dan memiliki stabilitas operasional, sehingga dapat memberikan perspektif yang relevan terkait praktik manajemen, kepatuhan pajak, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha mereka.

4.1.1.6 Responden Menurut Kepemilikan NPWP

Identifikasi responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat diketahui melalui penyebaran angket kepada 100 pelaku UMKM seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Responden Menurut Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase
Punya NPWP	100	100,0%
Tidak Punya NPWP	0	0%
Total	100	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa seluruh responden penelitian, yaitu 100 pelaku UMKM di Kota Semarang, telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menunjukkan bahwa 100% sampel sudah terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak, sehingga analisis penelitian dapat difokuskan pada tingkat kepatuhan mereka dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Tidak adanya responden yang belum memiliki NPWP juga memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan berasal dari pelaku UMKM yang secara administratif telah memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan perilaku kepatuhan pajak secara valid dalam konteks UMKM di Kota Semarang.

4.1.1.7 Responden Menurut Legalitas Usaha

Identifikasi responden berdasarkan legalitas usaha UMKM yang dimilikinya dapat diketahui melalui penyebaran angket kepada 100 pelaku UMKM seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Responden Menurut Legalitas Usaha UMKM

Legalitas Usaha	Jumlah	Persentase
Punya Legalitas	86	86,0%
Tidak Punya Legalitas	14	14,0%
Total	100	100,0%

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Semarang, yaitu 86% dari responden, telah memiliki legalitas usaha,

sedangkan 14% sisanya masih beroperasi tanpa legalitas resmi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah memenuhi persyaratan administratif yang memungkinkan mereka beroperasi secara formal dan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, keberadaan 14% UMKM yang belum memiliki legalitas usaha menandakan masih terdapat segmen usaha informal, yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Dengan demikian, legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis determinan kepatuhan pajak UMKM.

4.2 Analisis Data

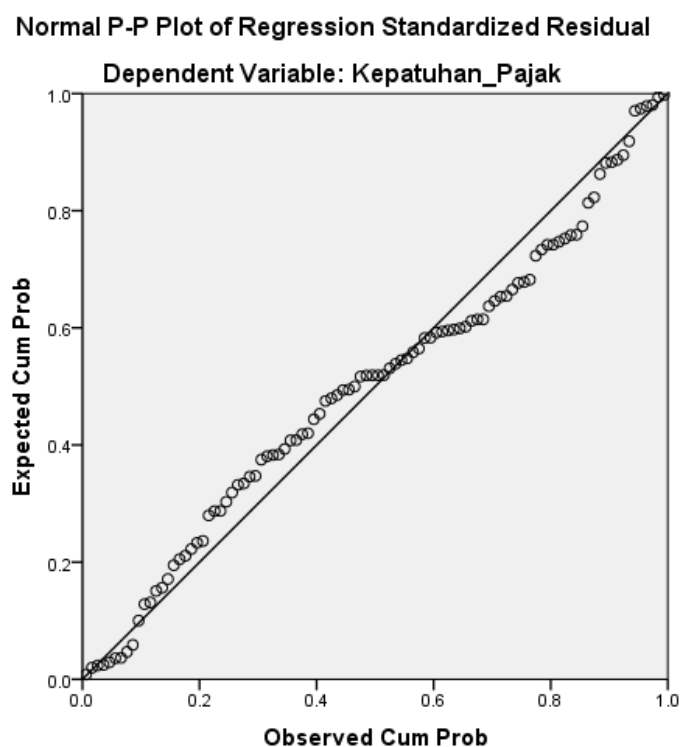
4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji persyaratan analisis regresi yaitu uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang dipergunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Model analisis regresi penelitian ini mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas data, dan uji heterokedastisitas.

4.2.1.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Untuk membuktikan apakah data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari bentuk distribusi datanya. Ada dua kriteria yang dapat digunakan dalam uji normalitas ini. Pertama adalah analisis grafik dan kurva probability plot (P-Plot) distribusi normal dan kedua adalah analisis statistik

menggunakan uji kolmogorov smirnov. Berikut ini adalah analisis grafik normal probability plot pada penelitian ini:



Gambar 4. 1 Hasil Pengujian Normalitas Data

Pada grafik di atas terlihat bahwa titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak menunjukkan penyimpangan yang mencolok, sehingga secara visual mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Keteraturan pola titik yang mendekati garis diagonal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat outlier ekstrem maupun distorsi distribusi yang dapat mengganggu asumsi normalitas. Temuan visual ini perlu dikonfirmasi secara statistik untuk memastikan kebenarannya, sehingga dilakukan pengujian Kolmogorov–Smirnov.

Hasil pengujian normalitas data menggunakan kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.01229202
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.072
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-smirnov* yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov 0.085 dengan nilai Asymp Sig. (2-tailed) 0.070 > nilai probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Temuan ini konsisten dengan hasil pengamatan grafik sebelumnya, di mana titik-titik data mengikuti garis diagonal tanpa penyimpangan yang ekstrem. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi, dan analisis regresi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya tanpa pelanggaran asumsi dasar.

4.2.1.2 Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Berikut hasil perhitungan multikolinieritas data penelitian ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas Data

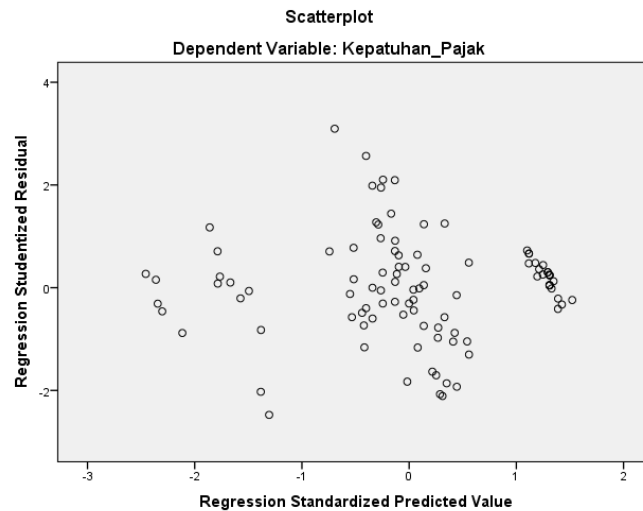
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.897	3.752			
Usia	-.021	.714	-.001	.875	1.142
Gender	-.302	1.043	-.009	.972	1.029
Pendidikan	-.277	.577	-.015	.901	1.110
Pendapatan	.300	.642	.016	.843	1.187
Modernisasi_Sistem_Pajak	1.559	.052	.952	.906	1.104

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, terlihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah multikolinearitas, sehingga masing-masing variabel bebas dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen tanpa adanya gangguan atau overlap antarvariabel. Hasil ini memastikan bahwa estimasi koefisien regresi tetap stabil dan dapat diinterpretasikan secara lebih akurat.

4.2.1.3 Uji Heterokedastisitas Data

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini dapat dilihat dalam *scatter plot* sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada Gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Pola sebaran yang tidak teratur ini menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan, sehingga model regresi dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Dengan kondisi demikian, model regresi layak digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan pajak berdasarkan variabel-variabel bebas yang diteliti.

Untuk memperkuat temuan tersebut, penelitian ini turut melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Dalam uji ini, model dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Gletjer

		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.450	2.407		4.342	.000
	Usia	-.679	.458	-.154	-1.481	.142
	Gender	.053	.669	.008	.080	.937
	Pendidikan	-.560	.370	-.155	-1.512	.134
	Pendapatan	-.529	.412	-.136	-1.285	.202
	Modernisasi_SistemPajak	-.024	.034	-.072	-.706	.482

a. Dependent Variable: res2

Tabel 4.10 diatas menunjukkan model penelitian yang digunakan terbebas dari masalah heterokedastisitas, karena semua variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05.

4.2.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui persamaan yang terbentuk dari hubungan antar variabel. Berikut adalah hasil uji regresi berganda dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5.897	3.752	
	Usia (X1)	-.021	.714	-.001
	Gender (X2)	-.302	1.043	-.009
	Pendidikan (X3)	-.277	.577	-.015
	Pendapatan (X4)	.300	.642	.016
	Modernisasi_SistemPajak (X5)	1.559	.052	.952

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil pengujian tersebut dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier bergada sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$Y = 5,897 - 0,021X_1 - 0,302X_2 - 0,277 X_3 + 0,300X_4 + 1,559X_5 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 5,897 dengan nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada variabel independent akan mengakibatkan kenaikan pada variabel dependen. Dapat diartikan pula bahwa nilai kepatuhan pajak sebesar 5,897 apabila masing-masing variabel independent yaitu usia, gender, pendidikan, pendapatan dan modernisasi sistem pajak bernilai konstan atau sama dengan nol.
- b. Variabel usia (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,021 menunjukkan bahwa variabel usia memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan pajak. Artinya jika variabel independent lain bersifat tetap atau konstan sedangkan usia bertambah 1 tahun maka akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 0,021.
- c. Variabel gender (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,302 menunjukkan bahwa variabel gender memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan pajak. Artinya jika variabel independent lain bersifat tetap atau konstan sedangkan gender mengalami perubahan jumlah perempuan atau laki-laki maka akan menurunkan nilai kepatuhan pajak sebesar 0,02.

- d. Variabel pendidikan (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,277 menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan pajak. Artinya jika variabel independent lain bersifat tetap atau konstan sedangkan tingkat pendidikan meningkat maka akan menurunkan nilai kepatuhan pajak sebesar 0,277.
- e. Variabel pendapatan (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,300 menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya jika variabel independent lain bersifat tetap atau konstan sedangkan pendapatan bertambah 1 satuan/1% maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 0,300.
- f. Variabel modernisasi sistem pajak (X5) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,559 menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya jika variabel independent lain bersifat tetap atau konstan sedangkan tingkat modernisasi sistem pajak bertambah 1 satuan atau 1% maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 1,559.

4.2.3 Uji Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, dalam hal ini tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Nilai R^2 yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS memberikan gambaran tentang proporsi perubahan kepatuhan pajak yang dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian,

seperti umur, gender, pendidikan, pendapatan, dan modernisasi sistem perpajakan. Hasil pengolahan SPSS didapatkan koefisien determinasi seperti di bawah ini.

Tabel 4. 12 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 ^a	.913	.908	5.14387

a. Predictors: (Constant), Modernisasi_SistemPajak, Pendidikan, Gender, Usia, Pendapatan

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,908 yang mengindikasikan persentase sebesar 90,8% dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil ini berarti bahwa variabel dependen kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keseluruhan variabel independen yaitu usia, gender, pendidikan, pendapatan dan modernisasi sistem pajak sebesar 90,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar model penelitian ini.

4.2.4 Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis pada penelitian ini terdiri dari uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan) dan

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Hasil pengujian uji parsial dapat dilihat dari tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.897	3.752		1.572	.119
Usia	-.021	.714	-.001	-.030	.976
Gender	-.302	1.043	-.009	-.290	.773
Pendidikan	-.277	.577	-.015	-.480	.632
Pendapatan	.300	.642	.016	.468	.641
Modernisasi_Sistem Pajak	1.559	.052	.952	29.748	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa

1. Variabel usia terhadap kepatuhan pajak, (nilai sig 0,976 > 0,05) maka hipotesis **ditolak** artinya usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Variabel Gender terhadap kepatuhan pajak, (nilai sig 0,773 > 0,05) maka hipotesis **ditolak** artinya gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Variabel pendidikan terhadap kepatuhan pajak, (nilai sig 0,632 > 0,05) maka hipotesis **ditolak** artinya pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. Variabel pendapatan terhadap kepatuhan pajak, (nilai sig 0,641 > 0,05) maka hipotesis ditolak artinya pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

5. Variabel modernisasi terhadap kepatuhan pajak, (nilai sig 0000 < 0,05) maka hipotesis **diterima** artinya modernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 14 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	26017.656	5	5203.531	196.661	.000 ^b
Residual	2487.184	94	26.459		
Total	28504.840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

b. Predictors: (Constant), Modernisasi_SistemPajak, Pendidikan, Gender, Usia, Pendapatan

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa hasil uji statistic F pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F hitungnya sebesar 196.661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana angka tersebut lebih kecil dari nilai 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara simultan antara usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, Hipotesis (H6) diterima yang berbunyi bahwa “Variabel usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan modernisasi sistem pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak”.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Umur Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor umur tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini terbukti dari nilai *t hitung* -0,030 dan signifikansi $0,976 > 0,05$, yang berarti bahwa perbedaan usia baik lebih muda maupun lebih tua tidak secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang juga menemukan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Primasari & Luhur, 2023).

Meskipun demikian, hasil ini tidak sepenuhnya selaras dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan faktor umur terhadap kepatuhan pajak. Studi pada wajib pajak di Kudus menemukan bahwa usia berperan dalam mendorong tingkat kepatuhan (Mulyani et al., 2020); begitu pula studi di Kota Bengkulu menemukan bahwa umur atau usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Seventeen et al., 2023). Studi penelitian faktor demografi di luar negeri seperti Kroasia juga menemukan bahwa umur berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Paleka et al., 2023). Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya variasi konteks dan karakteristik wajib pajak antarwilayah atau negara, yang dapat memengaruhi bagaimana faktor usia berperan dalam perilaku kepatuhan perpajakan.

Tidak adanya pengaruh umur terhadap kepatuhan pajak pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui Model Fischer, di mana variabel umur termasuk dalam

demographic factors yang dipandang sebagai faktor tidak langsung dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Dalam kerangka model tersebut, faktor demografi baru berpengaruh ketika berkaitan dengan elemen lain seperti pengetahuan pajak, pengalaman, persepsi risiko, dan tingkat pemahaman terhadap regulasi. Pada konteks UMKM di Kota Semarang, pemerataan akses informasi perpajakan melalui media digital, sosialisasi online, serta sistem pajak berbasis teknologi menyebabkan perbedaan usia tidak lagi menciptakan gap pengetahuan yang signifikan. Hal ini membuat pelaku UMKM yang lebih tua tidak otomatis memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik dibandingkan yang lebih muda, sehingga usia tidak menjadi faktor pembeda dalam perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian, ketidaksignifikanan variabel umur justru menunjukkan bahwa faktor kognitif dan sistemik lebih dominan dibanding faktor demografis murni.

4.3.2 Pengaruh Gender Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor gender tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-0,290$ dengan signifikansi $0,773 > 0,05$, yang berarti bahwa perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menjadi penentu tinggi rendahnya kepatuhan pajak. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa gender tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak (Mulyani et al., 2020). Konsistensi hasil juga terlihat pada penelitian di Jakarta Selatan yang menyimpulkan bahwa jenis

kelamin bukan faktor pembeda dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Primasari & Luhur, 2023).

Temuan ini bertentangan dengan studi sebelumnya yang menemukan bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Seventeen et al., 2023). Temuan serupa juga diidentifikasi dalam studi demografi perpajakan di Kroasia, di mana gender terbukti berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak (Paleka et al., 2023). Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak bersifat kontekstual dan dapat dipicu oleh variasi budaya, norma sosial, struktur ekonomi lokal, serta tingkat literasi perpajakan antarwilayah atau antarnegara.

Tidak ditemukannya pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif Model Fischer, di mana variabel demografis seperti gender termasuk dalam faktor tidak langsung yang hanya berpengaruh jika terkait dengan faktor antara seperti motivasi, persepsi, pengetahuan pajak, maupun tingkat pemahaman terhadap prosedur perpajakan. Pada wajib pajak UMKM di Kota Semarang, akses informasi perpajakan berbasis digital, penyederhanaan sistem pajak, serta kesetaraan peran ekonomi antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi faktor yang membuat perilaku kepatuhan pajak relatif homogen antar gender. Dengan demikian, tidak adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini mencerminkan bahwa kepatuhan pajak lebih dominan dipengaruhi oleh faktor internal dan situasional, bukan oleh faktor biologis atau demografis seperti jenis kelamin.

4.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung $-0,480$ dengan signifikansi $0,632 > 0,05$, yang mengindikasikan bahwa perbedaan jenjang pendidikan baik rendah maupun tinggi tidak memberikan efek signifikan terhadap perilaku kepatuhan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang juga menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Primasari & Luhur, 2023).

Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak selaras dengan beberapa studi sebelumnya. Penelitian yang dilakukan pada wajib pajak di Kudus menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Mulyani et al., 2020). Temuan serupa juga dilaporkan dalam penelitian demografi perpajakan di Kroasia, di mana tingkat pendidikan berkontribusi signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Paleka et al., 2023). Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa efek pendidikan terhadap kepatuhan pajak tidak bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, kualitas literasi pajak, serta efektifitas sistem edukasi perpajakan di masing-masing wilayah.

Tidak adanya pengaruh pendidikan dalam perspektif Model Fischer, dikarenakan variabel pendidikan dikategorikan sebagai *demographic factors* yang merupakan faktor tidak langsung dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Dalam model ini, pendidikan tidak serta-merta memengaruhi kepatuhan; pengaruhnya

baru muncul apabila pendidikan meningkatkan *tax knowledge*, *tax awareness*, persepsi risiko, atau motivasi kepatuhan. Pada konteks penelitian ini, pelaku UMKM dengan pendidikan tinggi belum tentu memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik, karena pemahaman perpajakan lebih dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, pengalaman berinteraksi dengan sistem pajak, serta kualitas layanan administrasi. Dengan demikian, tidak signifikannya pendidikan dalam penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak lebih ditentukan oleh faktor situasional dan psikologis, bukan sekadar tingkat pendidikan formal

4.3.4 Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $-0,468$ dan signifikansi $0,641 > 0,05$, yang berarti bahwa perbedaan tingkat pendapatan baik rendah maupun tinggi tidak memengaruhi perilaku pelaporan maupun pembayaran pajak. Dengan demikian, tingkat pendapatan tidak menjadi penentu utama dalam kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Hasil ini tidak selaras dengan beberapa penelitian lain yang menemukan adanya pengaruh signifikan dari pendapatan terhadap kepatuhan pajak. Studi pada wajib pajak UMKM di Kudus dan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Mulyani et al., 2020); (Seventeen et al., 2023). Dalam konteks tersebut, wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas finansial dan administratif

yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, penelitian internasional di Kroasia justru menemukan hubungan negatif yang signifikan antara pendapatan dan kepatuhan pajak (Paleka et al., 2023) di mana wajib pajak berpendapatan tinggi lebih cenderung menghindari pajak karena peluang, sumber daya, dan insentif ekonomi yang berbeda.

Faktor pendapatan, dalam perspektif Model Fischer termasuk dalam kelompok *economic factors* yang merupakan faktor tidak langsung dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Model ini menjelaskan bahwa variabel ekonomi seperti pendapatan hanya akan memberikan pengaruh apabila berkaitan dengan faktor lain, seperti kemampuan membayar, persepsi terhadap beban pajak, serta tingkat moralitas perpajakan. Dalam konteks UMKM Kota Semarang, pelaku usaha dengan pendapatan lebih tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik, karena perilaku kepatuhan mereka lebih dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan, kemudahan administrasi perpajakan, serta persepsi risiko terhadap sanksi. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan pendapatan menegaskan bahwa faktor psikologis, struktural, dan informasi memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor ekonomi semata dalam menentukan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

4.3.5 Pengaruh Faktor Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang terbukti dari nilai t hitung 29,748 dan signifikansi $0,000 < 0,05$

sehingga tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM sangat ditentukan oleh tingkat modernisasi sistem pajak. Temuan ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang juga menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM (Putra, 2020); (Palupi & Arifin, 2023).

Adanya pengaruh positif modernisasi sistem perpajakan pada penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta berbagai layanan berbasis aplikasi berhasil meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM. Dengan sistem yang semakin sederhana, praktis, dan minim tatap muka, hambatan administratif yang sebelumnya sering menjadi alasan ketidakpatuhan dapat diminimalkan. Pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami kesulitan memahami formulir manual atau merasa terbebani oleh proses birokratis kini dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berfungsi sebagai katalis yang mengurangi beban kepatuhan (*compliance cost*), sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Faktor modernisasi sistem perpajakan dalam model Fisher termasuk dalam *structural factors* yang dianggap sebagai faktor langsung yang memengaruhi kepatuhan pajak. Model ini menekankan bahwa struktur sistem yang mencakup prosedur, transparansi, kejelasan mekanisme, dan aksesibilitas administrasi memegang peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Dalam konteks UMKM Kota Semarang, peningkatan kualitas sistem digital memberikan kepastian prosedural, akses informasi yang lebih luas, serta mengurangi potensi

kesalahan dalam pelaporan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembenahan struktur dan sistem perpajakan merupakan determinan utama tingkat kepatuhan pajak, bahkan dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan faktor demografis maupun ekonomi wajib pajak.